

**PENGARUH BELANJA MODAL TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN
MANUSIA MELALUI PERTUMBUHAN EKONOMI SEBAGAI VARIABEL
INTERVENING PROVINSI BALI**

**Gusi Bagus Kompiang Putra Setiawan¹
Dewa Nyoman Budiana²**

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia
e-mail: kompyangputra@gmail.com

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia

ABSTRAK

Indeks pembangunan manusia merupakan salah satu variabel yang digunakan untuk mengukur kesejahteraan masyarakat. Perbedaan tingkat kesejahteraan masyarakat menyebabkan terjadinya ketimpangan dan kesenjangan antar daerah. Kebijakan pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui alokasi belanja modal dan laju pertumbuhan ekonomi, memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas IPM. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh belanja modal terhadap indeks pembangunan manusia melalui pertumbuhan ekonomi sebagai variabel intervening pada kabupaten/kota di Provinsi Bali periode 2008-2013. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis jalur/*Path Analysis*. Hasil analisis menunjukkan bahwa: 1) belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, 2) Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia, 3) belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia, 4) belanja modal berpengaruh secara tidak langsung terhadap indeks pembangunan manusia melalui mediasi pertumbuhan ekonomi menunjukkan hasil z hitung 4,35 lebih besar dibandingkan z tabel 1,96. Artinya bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan variabel mediasi.

Kata kunci: *Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia*

ABSTRACT

Human development index is one of the many variables used to measure people's welfare. The vast difference between people's welfare causes inequality among regions. Through government policy, as in increasing government spending on capital, increases people's welfare, economic growth and also contributes in raising the quality of human development index. Using Path Analysis, this study is conducted to find out the impact of government's capital expenditure on human capital index through economic growth as intervening variable on Bali during 2008-2013. The result shows that: 1) Government's capital expenditure has positive and significant impact on economic growth, 2) Economic growth has positive and significant impact on human development index, 3) Capital expenditure has positive and significant impact on human development index, and, 4) Spending on capital has indirect effect on human development index through economic growth as mediator. This is shown by the value of z-statistic 4,35 which larger than the value of z-table 1,96. It means that economic growth is mediating variables.

Keywords: *Capital Expenditures, Economic Growth and Human Development Index*

PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan bangsa dan pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk menilai keberhasilan pembangunan dari suatu negara. Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tercantum tujuan bangsa Indonesia bahwa diantaranya yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa (Mirza, 2012). Salah satu indikator terpenting yang menggambarkan keberhasilan pembangunan ekonomi yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pada tahun 1990 *The United Nations Development Programme* (UNDP) merumuskan pembangunan manusia sebagai suatu proses perluasan pilihan manusia dalam meningkatkan kesempatan mereka untuk memperoleh pendidikan, pelayanan kesehatan, penghasilan, dan pekerjaan. (Stanton, 2007).

Paradigma pembangunan yang sedang berkembang saat ini adalah pertumbuhan ekonomi yang salah satunya diukur dengan pembangunan manusia, yang menjadikan pembangunan manusia sebagai tujuan akhir dari pertumbuhan ekonomi (Anggraini dan Lutfhi, 2012). Salah satu tolak ukur yang digunakan dalam melihat kualitas sumber daya manusia adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang diukur melalui dimensi kesehatan yang diukur dengan angka harapan hidup, pendidikan yang diukur dengan angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah, standar hidup yang layak diukur dengan paritas daya beli (BPS Provinsi Bali, 2012).

Pertumbuhan indeks pembangunan manusia Provinsi Bali selama 6 tahun mulai periode 2008-2013 menunjukkan tren yang semakin meningkat terlihat pada data BPS Provinsi Bali, IPM Bali pada tahun 2008 sebesar 70,98 persen. pada tahun 2009 mengalami peningkatan sebesar 71,52 persen. pada tahun 2010 mengalami peningkatan sebesar 72,28 persen. pada tahun 2011 mengalami peningkatan sebesar 72,84 persen. pada tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar 73,49 persen. peningkatan juga terjadi pada tahun 2013 sebesar 74,11 persen (BPS Provinsi Bali, 2014).

Tabel 1.
Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2008 – 2013.

Kabupaten/Kota	IPM (%)						Rata-rata
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Jembrana	72,02	72,45	72,69	73,18	73,62	74,29	73,04
Tabanan	73,73	74,26	74,57	75,24	75,55	76,19	74,92
Badung	74,12	74,49	75,02	75,35	75,69	76,37	75,17
Gianyar	72,00	72,43	72,73	73,43	74,49	75,02	73,35
Klungkung	69,66	70,19	70,54	71,02	71,76	72,25	70,90
Bangli	69,72	70,21	70,71	71,42	71,80	72,28	71,02
Karangasem	65,46	66,06	66,42	67,07	67,83	68,47	66,88
Buleleng	69,67	70,26	70,69	71,12	71,93	72,54	71,03
Denpasar	77,18	77,56	77,94	78,31	78,80	79,41	78,20

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2014

Berdasarkan Tabel 1 IPM Provinsi Bali menurut kabupaten/kota dari tahun 2008-2013 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kota Denpasar menduduki peringkat tertinggi yaitu dengan pencapaian rata-rata 78,20 persen dan menunjukkan pertumbuhan IPM tertinggi pada tahun 2013 sebesar 79,41 persen, sedangkan IPM terendah ditempati oleh Kabupaten Karangasem dengan rata-rata

66,88 persen. I Wayan Sumatra, S.T. dan Ketua DPRD I Gede Dana dalam (Bali Post, 2013) menyatakan rendahnya IPM Kabupaten Karangasem menunjukkan sumber daya manusia yang masih rendah. Indeks pembangunan manusia kabupaten/kota Provinsi Bali mengindikasikan terjadinya ketimpangan yang akan menyebabkan terjadinya kesenjangan antar daerah.

Kebijakan pemerintah yaitu dengan mengalokasikan dana dalam bentuk belanja modal dalam APBD diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Halim (2002:72) belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang akan menambah aset atau kekayaan daerah, Belanja modal merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tujuan otonomi daerah yaitu meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yaitu dengan menyediakan fasilitas yang bersinggungan langsung dengan pelayanan publik.

Tabel 2.
Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2008– 2013.

Kabupaten/ Kota	Belanja Modal (Ribu Rupiah)						Rata-rata
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Jembrana	91,513,245	100,666,924	58,163,280	67,439,524	134,613,774	142,563,466	98,858,658
Tabanan	64,749,575	77,334,812	107,905,991	70,442,612	138,723,070	128,186,385	97,890,408
Badung	482,467,897	445,014,330	176,302,823	199,704,214	627,705,700	766,712,190	449,651,192
Gianyar	98,582,120	160,249,036	109,959,088	124,148,151	120,627,457	185,232,496	133,133,058
Klungkung	152,441,335	141,782,331	77,507,954	118,836,949	171,630,950	130,737,648	132,156,195
Bangli	85,207,968	48,305,379	68,608,586	114,687,924	82,340,927	62,762,964	76,985,625
Karangasem	63,514,089	82,507,035	42,555,098	49,010,249	81,223,182	64,093,972	63,817,271
Buleleng	85,197,526	102,442,037	47,207,570	121,895,911	79,433,838	185,896,717	102,845,600
Denpasar	66,105,319	88,378,340	65,756,361	88,771,661	206,143,714	254,008,353	128,193,985

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2014

Berdasarkan Tabel 2 menunjukkan data belanja modal periode 2008-2013 pada kabupaten/kota di Provinsi Bali. Belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama kurun waktu enam tahun mengalami fluktuasi. Kontribusi realisasi

APBD dalam bentuk belanja modal Kabupaten Badung menunjukkan rata-rata belanja modal tertinggi yaitu sebesar 449,651,192 ribu rupiah, sedangkan rata-rata Kabupaten Karangasem menunjukkan rata-rata belanja modal terendah yaitu sebesar 63,817,271 ribu rupiah. Nikos (2009) menyatakan dalam hasil penelitian yang dilakukan yaitu pengeluaran pemerintah untuk infrastruktur dampak positif pada pertumbuhan perkapita.

Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan dari kegiatan perekonomian yang berdampak pada jumlah produksi barang dan jasa yang semakin bertambah sehingga kemakmuran masyarakat meningkat. Pertumbuhan ekonomi daerah diproksikan dengan menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB yaitu total atas keseluruhan nilai barang dan jasa yang diperoleh dari seluruh kegiatan perekonomian yang dilakukan di daerah. Tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah dihitung dengan PDRB atas dasar harga konstan 2000 (Prakarsa, 2014).

Tabel 3.
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2000 Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Periode 2008 – 2013.

Kabupaten/ Kota	PDRB (%)						Rata-rata
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Jembrana	5,05	4,82	4,57	5,61	5,9	5,38	5,22
Tabanan	5,22	5,44	5,68	5,82	5,91	6,03	5,68
Badung	6,91	6,39	6,48	6,69	7,3	6,41	6,69
Gianyar	5,9	5,93	6,04	6,76	6,79	6,43	6,28
Klungkung	5,07	4,92	5,43	5,81	6,03	5,71	5,49
Bangli	4,02	5,71	4,97	5,84	5,99	5,61	5,35
Karangasem	5,07	5,01	5,09	5,19	5,73	5,81	5,31
Buleleng	5,84	6,1	5,85	6,11	6,52	6,71	6,08
Denpasar	6,83	6,53	6,57	6,77	7,18	6,54	6,74

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2014

Tabel 3 menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi periode 2008-2013 pada kabupaten/kota di Provinsi Bali. Selama kurun waktu 2008-2013 Kabupaten Badung menunjukkan rata-rata pertumbuhan ekonomi yang tinggi yaitu sebesar 6,69 persen. Ditunjukkan pada tahun 2012 Kabupaten Badung pernah mencapai pertumbuhan ekonomi tertinggi mencapai 7,30 persen, sedangkan rata-rata pertumbuhan ekonomi terendah terjadi pada Kabupaten Jembrana yaitu sebesar 5,22 persen. Ditunjukkan pada tahun 2013 Kabupaten jembrana mencapai 5,38 persen. Dapat dilihat pula keadaan pertumbuhan ekonomi yang mengalami ketidak tentuan dari tabel 3. terjadi fluktuasi di setiap daerah di Provinsi Bali dengan keadaan yang tidak menentu akan susah melihat pertumbuhan ekonomi kedepannya. Menurut Anggraini dan Lutfhi (2012), pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia memiliki keterkaitan dan saling berkontribusi satu sama lain. Pertumbuhan ekonomi merupakan prasyarat bagi tercapainya pembangunan manusia, karena dengan pertumbuhan ekonomi akan menjamin meningkatnya produktivitas dan pendapatan melalui penciptaan kesempatan kerja

Bedasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penenilitan ini adalah: 1) Apakah belanja modal berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Bali periode 2008-2013?, 2) Apakah belanja modal dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia pada kabupaten/kota di Provinsi Bali periode 2008-2013?, 2) Apakah belanja modal berpengaruh secara tidak langsung

terhadap indeks pembangunan manusia melalui mediasi pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Bali periode 2008-2013?

Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Bali periode 2008-2013, 2) Untuk mengetahui pengaruh belanja modal dan pertumbuhan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia pada kabupaten/kota di Provinsi Bali periode 2008-2013, 3) Untuk mengetahui pengaruh tidak langsung dari belanja modal terhadap indeks pembangunan manusia melalui mediasi pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Bali periode 2008-2013.

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi ataupun pengetahuan bagi peneliti serta memberikan informasi kepada Pemerintah, masyarakat dan pemangku kebijakan yang berkaitan dengan pengaruh Belanja Modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia melalui Mediasi Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2008-2013.

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi (Halim, 2007:101). Menurut peraturan pemerintah No. 25 Tahun 2005 belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan

dalam rangka menambah asset atau kekayaan serta menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan biaya pemeliharaan (Sheila, 2012).

Menurut Prof. Simon Kuznets dalam (Jhingan, 2004:57) mendefinisikan pertumbuhan ekonomi kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya. Pertumbuhan ekonomi akan terjadi apabila ada kecenderungan yang terjadi dari proses internal perekonomian, artinya harus berasal dari kekuatan yang ada di dalam perekonomian itu sendiri. Untuk mengetahui apakah suatu perekonomian mengalami pertumbuhan, harus dipertimbangkan PDRB riil satu tahun (PDRBt) dengan PDRB riil tahun sebelumnya (PDRBt-1) (Krisna Dewi,2014).

Model pembangunan atau tahap-tahap pertumbuhan ekonomi yang dicetuskan oleh Rostow dalam bukunya (*the stages of economic growth*). Menurut Rostow pembangunan ekonomi dapat dibedakan dalam lima tahap yaitu masyarakat tradisional (*the traditional society*), prasyarat untuk tinggal landas (*the preconditions for take-off*), tinggal landas (*the take-off*), menuju kedewasan (*the drive to maturity*), dan masa konsumsi tinggi (*the age of high mass-consumption*). setiap Negara didunia dapat digolongkan ke dalam salah satu dari kelima tahap pertumbuhan ekonomi (Sukirno,2006:167).

Teori pertumbuhan Harrod Domar dikembangkan oleh dua orang ahli ekonomi yaitu Evsey Domar (1947) dan R.F. Harrod (1939). Teori ini dikembangkan secara terpisah, tetapi memiliki inti dari teori yang sama. Keduanya melihat pentingnya investasi terhadap pertumbuhan ekonomi, sebab investasi akan meningkatkan stok barang modal, yang memungkinkan peningkatan output (Sukirno, 2006: 256).

Teori pertumbuhan Neoklasik berkembang sejak tahun 1950-an, ekonom yang menjadi perintis dalam mengembangkan teori ini Robert Solow dan Trevor Swan. Menurut Solow dan Swan pertumbuhan ekonomi tergantung pada ketersediaan faktor-faktor produksi yaitu, penduduk, akumulasi modal, dan kemajuan teknologi (Arsyad, 2010: 88). Teori pertumbuhan Neo-Klasik didasarkan pada fungsi produksi yang telah dikembangkan oleh dua penulis Amerika, yaitu Charles Cobb dan Paul Douglas yang lazim dikenal sebagai fungsi produksi *Cobb-Douglas* (Sukirno, 2006: 266).

Teori pertumbuhan endogen yang dipelopori oleh Romer (1986) dan Lucas (1988). Bidang kajian yang menarik perhatian Romer adalah pertumbuhan ekonomi memiliki persepektif yang lebih luas dengan memasukkan komponen teknologi endogen hasil dari penelitian dan pengembangan (*research & development*) dan ilmu pengetahuan ke dalam model pertumbuhan ekonomi (Arsyad, 2010: 91).

Konsep kesejahteraan masyarakat merujuk pada konsep pembangunan kesejahteraan sosial, yakni serangkaian aktivitas yang terencana dan melembaga

yang ditujukan untuk meningkatkan standar dan kualitas kehidupan manusia (Suharto,2006). Pengertian kesejahteraan sosial menurut Whithaker dan Federico (1997) merupakan sistem suatu bangsa tentang manfaat barang dan jasa untuk

membantu masyarakat guna memperoleh kebutuhan sosial,ekonomi, pendidikan, kesehatan yang penting bagi kelangsungan masyarakat. Menurut *Human Development Report* (1995) dalam (Yusuf, 2014), pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi manusia (“*a process of enlarging people’s choices*”) bahwa fokus pembangunan suatu negara adalah penduduk karena penduduk adalah kekayaan nyata suatu negara.

Konsep Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut UNDP dan Badan Pusat Statistik (BPS) mengacu pada pengukuran capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup, yaitu : 1) Angka harapan hidup untuk mengukur pencapaian dibidang kesehatan, 2) Angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah untuk mengukur pencapaian di bidang pendidikan, 3) Standar kehidupan layak yang diukur dengan konsumsi per kapita.

Menurut Rostow dan Mugrave dalam (Guritno,1993:170) yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan tahap awal, tahap menengah, dan tahap lanjut. Pada tingkat ekonomi selanjutnya, Rostow mengatakan bahwa aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti kesejahteraan hari tua, program pelayanan kesehatan

masyarakat, dan di perjelas oleh hukum Wagner dalam perekonomian, apabila pendapatan perkapita meningkat, secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat (Guritno, 1993:171).

Penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan (2011) menyatakan alokasi belanja modal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian yang dilakukan oleh Chinweoke dan Okeoma Paschal (2014) menunjukkan bahwa Pengeluaran Pemerintah memiliki dampak positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Nigeria.

Aschauer (1989) dengan hasil yang menunjukkan dampak signifikan dari modal publik terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian yang dilakukan oleh Jimmy (2013) hasil penelitian menemukan bahwa pengeluaran pemerintah di bidang infrastruktur mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Menurut Midgley (1995) Menjelaskan bahwa pembangunan sosial merupakan pendekatan pembangunan secara eksplisit berusaha mengintegrasikan proses pembangunan ekonomi dan sosial. Pembangunan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi merupakan syarat bagi tercapainya pembangunan manusia karena dengan pembangunan ekonomi terjamin peningkatan produktivitas dan peningkatan pendapatan melalui penciptaan kesempatan kerja (Muammil, 2012).

Mirza (2012) Pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian Ramirez (1998) menyebutkan bahwa terdapat hubungan positif antara pertumbuhan ekonomi dengan indeks pembangunan manusia.

Penelitian yang dilakukan Lugastoro (2013) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Krisna Dewi (2014) menunjukkan pertumbuhan ekonomi secara parsial berdampak positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Anggaran belanja daerah pada hakekatnya merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, dengan demikian APBD harus benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi keanekaragaman daerah (Halim, 2001:220). Yusuf (2014) menyatakan bahwa belanja modal mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Penelitian yang dilakukan oleh Oluwatobi (2011) menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara pengeluaran pemerintah pada pengembangan sumber daya manusia. Sri Kusreni dan Suhab (2009) menyatakan alokasi belanja modal berhubungan positif dan berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan pokok permasalahan, tujuan penelitian, tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu maka hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 1) Belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Bali periode 2008-2013, 2) Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia pada kabupaten/kota di Provinsi Bali periode 2008-2013, 3) Belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia pada kabupaten/kota di Provinsi Bali periode 2008-2013, 4) Belanja modal berpengaruh secara tidak langsung terhadap indeks pembangunan manusia pada kabupaten/kota di Provinsi Bali melalui mediasi Pertumbuhan Ekonomi periode 2008-2013.

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian dilakukan pada kabupaten/kota di Provinsi Bali dengan mencari data-data yang telah dikumpulkan oleh pihak sebelumnya seperti Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia yang diperoleh dari di Badan Pusat Statistik Provinsi Bali periode 2008-2013. Obyek dalam penelitian ini adalah Belanja Modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel intervening pada kabupaten/kota di Provinsi Bali periode 2008-2013.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu variabel endogen, variabel eksogen, dan variabel intervening. Variabel-variabel tersebut antara lain (Suyana Utama, 2009:136): 1) Variabel endogen merupakan variabel yang hanya berfungsi sebagai variabel terikat dimana pada diagram jalur hanya menerima

anak panah. Variabel terikat dalam penelitian ini yaitu Indeks Pembangunan Manusia pada kabupaten/kota di Provinsi Bali, 2) Variabel eksogen adalah variabel yang hanya berfungsi sebagai variabel bebas. Variabel eksogen dalam penelitian ini adalah Belanja Modal pada kabupaten/kota di Provinsi Bali 3) Variabel intervening yaitu variabel yang memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai variabel terikat dan variabel bebas. Variabel intervening dalam penelitian ini adalah Pertumbuhan Ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Menurut Halim (2002:72) belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran. Belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah seperti belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan, serta belanja modal fisik lainnya (Lilis Setyowati, 2012). Dalam penelitian ini ukuran dari pengalokasian belanja modal dengan satuannya adalah ribu rupiah.

Pertumbuhan ekonomi adalah penambahan kegiatan produksi barang dan jasa sebagai upaya peningkatan kemakmuran masyarakat. Pertumbuhan ekonomi wilayah diukur dengan perbandingan antara PDRB riil satu tahun (PDRBt) dengan PDRB riil tahun sebelumnya (PDRBt-1) di bagi dengan (PDRBt-1) di kalikan seratus (Krisna Dewi, 2014).

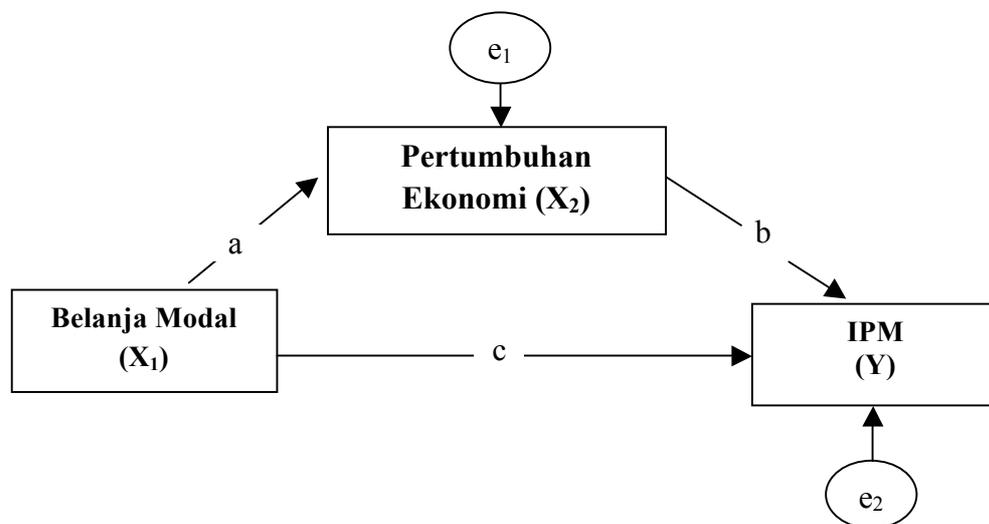
Dalam penelitian ini pertumbuhan ekonomi menggunakan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Atas Dasar

Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha. Satuan dari pertumbuhan ekonomi adalah persen.

Menurut *Human Development Report* (1990), pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi manusia (“*a process of enlarging people’s choices*”) bahwa fokus pembangunan suatu negara adalah penduduk karena penduduk adalah kekayaan nyata suatu negara (Yusuf 2014). Konsep Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut UNDP dan Badan Pusat Statistik (BPS) mengacu pada pengukuran capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup, yaitu angka harapan hidup untuk mengukur pencapaian di bidang kesehatan, angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah untuk mengukur pencapaian di bidang pendidikan, serta standar kehidupan layak yang diukur dengan konsumsi per kapita. Satuan dari Indeks Pembangunan Manusia adalah persen.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan Analisis Jalur / *Path Analysis*. Dalam penelitian ini, metode analisis yang digunakan adalah analisis jalur (*path analysis*) dengan bantuan alat analisis SPSS 16.0 *for windows*. Analisis jalur dikembangkan sebagai metode untuk mempelajari pengaruh secara langsung dan tidak langsung dari variabel *exogenous* terhadap variabel *endogenous*. Analisis jalur merupakan perluasan dari analisis regresi linear berganda yang digunakan untuk menaksir kausalitas antar variabel berdasarkan teori (Suyana Utama, 2009:135).

Gambar 1. Desain Penelitian Analisis jalur Pengaruh Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Melalui Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Intervening



Keterangan:

Struktural 1:

X1 = Belanja Modal

X2 = Pertumbuhan Ekonomi

Y = Indeks Pembangunan Manusia

e1 = *standard error of estimate*

e2 = *standard error of estimate*

a = koefisien jalur pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi

b = koefisien jalur pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap IPM

c = koefisien jalur pengaruh belanja modal terhadap IPM

Suyana Utama (2009) pengujian hipotesis mediasi dikenal dengan uji Sobel. Uji Sobel ini dilakukan dengan cara mmenguji kekuatan pengaruh tidak langsung variabel Belanja Modal (X_1) terhadap variabel Indeks Pembangunan Manusia (Y) melalui variabel Pertumbuhan Ekonomi (X_2). Pengaruh tidak langsung variabel Belanja Modal (X_1) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Y)

melalui variabel Pertumbuhan Ekonomi (X_2) dihitung dengan cara mengalikan koefisien tak standar jalur X_1 terhadap X_2 (a) dengan jalur X_2 terhadap Y (b) atau ab. Standar error koefisien a dan b ditulis dengan S_a dan S_b besarnya standar error tidak langsung (indirect effect) S_{ab} dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$S_{ab} = \sqrt{b^2 S_a^2 + a^2 S_b^2} \dots\dots\dots(3.5)$$

Untuk menguji signifikansi pengaruh tidak langsung maka menghitung nilai z dari koefisien ab dengan rumus sebagai berikut :

$$Z = \frac{ab}{S_{ab}} \dots\dots\dots(3.6)$$

Keterangan :

- a = jalur X_1 terhadap X_2 .
- b = jalur X_2 terhadap Y.
- ab = jalur X_1 terhadap X_2 (a) dengan jalur X_2 terhadap Y (b)
- S = besar standar error tidak langsung
- S_a = standar error koefisien a.
- S_b = standar error koefisien b.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Provinsi Bali

Provinsi Bali merupakan salah satu dari 33 Provinsi di Indonesia yang memiliki luas wilayah sebesar 5.636,66 km² atau 0,29 persen dari wilayah Indonesia. Provinsi Bali memiliki beberapa, pulau besar dan pulau kecil. Dimana pulau Bali sebagai pulau terbesar, pulau nusa penida, pulau nusa lembongan, pulau nusa ceningan, pulau menjangan yang terletak di sebelah barat pulau Bali

dan pulau serangan yang terletak disekitar kaki pulau Bali. Berikut adalah data Luas wilayah masing-masing dari Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tersebut akan disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4.
Luas Wilayah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2013.

Kabupaten/Kota	Ibukota	Luas (km²)
Jembrana	Negara	841,8
Tabanan	Tabanan	839,33
Badung	Mangupura	418,52
Gianyar	Gianyar	368
Klungkung	Semarapura	315
Bangli	Bangli	520,81
Karangasem	Amlapura	839,54
Buleleng	Singaraja	1.365,88
Denpasar	Denpasar	127,78
Prov. Bali	Denpasar	5.636,66

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2014

Provinsi Bali terdiri dari delapan kabupaten dan satu kota yang meliputi Kabupaten Jembrana, Tabanan, Badung, Gianyar, Klungkung, Bangli, Buleleng, Karangasem, dan Kota Denpasar. Luas wilayah jika terbagi menurut kabupaten/kota maka Kabupaten Buleleng dengan ibukotanya Singaraja memiliki luas wilayah terbesar yaitu 1,365,88 km², dan luas wilayah terkecil adalah Kota Denpasar dengan luas wilayah sebesar 127,78 km².

Statistik Deskriptif variabel

Statistik deskriptif dalam penelitian ini disajikan untuk memberikan informasi mengenai karakteristik variabel-variabel penelitian, antara lain minimum, maksimum, *mean*, dan standar deviasi. Pengukuran rata-rata (*mean*) merupakan cara yang paling umum digunakan untuk mengukur nilai sentral dari

suatu distribusi data. Sedangkan, standar deviasi merupakan perbedaan nilai data yang diteliti dengan nilai rata-ratanya. Hasil statistik deskriptif variabel dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 5.
Hasil Statistik Deskriptif Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi, dan Indeks Pembangunan Manusia

	N	Minimum	Maximum	Mean
Belanja modal	54	6,71	8,10	74,396
Pertumbuhan ekonomi	54	4,02	7,30	58,893
IPM	54	65,46	79,41	727,261
Valid N (listwise)	54			

Sumber: data diolah, 2015

Berdasarkan Tabel 5 dapat dilihat nilai minimum untuk belanja modal adalah 6,71 dan nilai maximumnya adalah 8,10. Nilai mean untuk belanja modal adalah 7,43, hal ini berarti rata-rata belanja modal di Provinsi Bali sebesar 7,43 dengan standar deviasinya 0,32. Untuk variabel pertumbuhan ekonomi nilai minimum adalah 4,02 dan nilai maximumnya adalah 7,30. Nilai mean untuk pertumbuhan ekonomi adalah 5,88, hal ini berarti rata-rata pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali sebesar 5,88 dengan standar deviasinya 0,69. Untuk variabel indeks pembangunan manusia nilai minimum adalah 65,46 dan nilai maximumnya adalah 79,41. Nilai mean untuk indeks pembangunan manusia adalah 72,72, hal ini berarti rata-rata indeks pembangunan manusia di Provinsi Bali adalah 72,72 dengan standar deviasi sebesar 3,22.

Hasil pengaruh langsung variabel belanja modal dan pertumbuhan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 6.
Ringkasan Hasil Regresi Pengaruh Langsung Variabel

Hubungan variabel	Koefisien	Signifikansi
Belanja Modal (X1) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (X2)	0,422	0,001
Pertumbuhan Ekonomi (X2) Terhadap IPM (Y)	0,297	0,000
Belanja Modal (X1) Terhadap IPM (Y)	0,819	0,000

Sumber : data diolah, 2015

Tabel 6 merupakan ringkas dari hasil pengaruh langsung variabel yang ditunjukkan oleh koefisien standar jalur atau nilai *Beta*. Berdasarkan tabel 5 Variabel belanja modal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 0,422 yang ditunjukkan oleh nilai koefisien, variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap IPM sebesar 0,297 yang ditunjukkan oleh nilai koefisien, dan variabel belanja modal berpengaruh positif terhadap IPM sebesar 0,819 yang ditunjukkan oleh nilai koefisien.

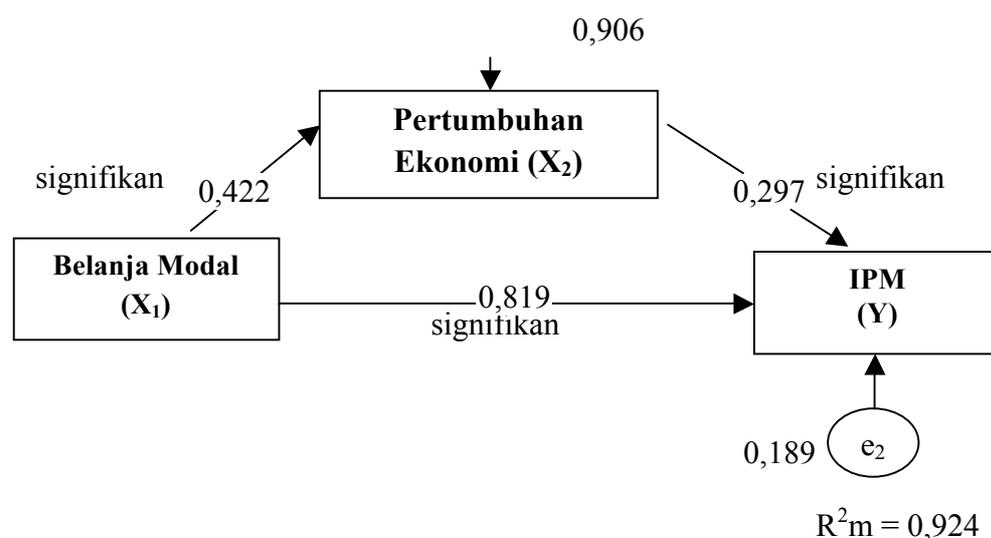
Pemeriksaan Validitas Model

Valid tidaknya suatu hasil dilihat dari terpenuhi atau tidaknya asumsi yang melandasinya. Ada dua indikator yang dapat dilakukan untuk memeriksa validitas model, yaitu koefisien determinasi total dan *trimming theory* dimana hasilnya dapat disajikan sebagai berikut.

Hasil koefisien determinasi total : $R^2_m = 0,924$. Artinya, keragaman data yang dapat dijelaskan oleh model adalah sebesar 92,4 persen atau dengan kata lain informasi yang terkandung dalam data sebesar 92,4 persen dapat dijelaskan oleh model yang dibentuk, sedangkan sisanya yaitu 7,6 persen dijelaskan oleh variabel lain diluar model yang dibentuk.

Gambar 2. Model Jalur Hubungan Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi, dan Indeks Pembangunan Manusia





Interpretasi Model

Berdasarkan hasil olahan data menunjukkan bahwa belanja modal signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil perhitungan diperoleh koefisien jalur belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi yaitu 0,422 dan taraf signifikansi penelitian untuk variabel belanja modal sebesar $0,001 < 0,05$, sehingga H₀ ditolak dan H₁ diterima, berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Bali tahun 2008-2013.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh jimmy (2013) menggunakan alat analisis regresi, dimana hasil penelitian menemukan bahwa pengeluaran pemerintah di bidang infrastruktur mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Papua dengan tahun pengamatan di 2008-2011.

Berdasarkan hasil olahan data menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Hasil perhitungan diperoleh koefisien jalur yaitu 0,297 dan taraf signifikansi penelitian untuk variabel pertumbuhan ekonomi sebesar $0,000 < 0,05$, sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia pada kabupaten/kota di Provinsi Bali tahun 2008-2013.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mirza (2012). Pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM di Provinsi Jawa Tengah yang berarti pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. Penelitian Ramirez (1998) menyebutkan bahwa terdapat hubungan positif antara pertumbuhan ekonomi dengan indeks pembangunan manusia.

Berdasarkan hasil olahan data menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia, Hasil perhitungan diperoleh koefisien jalur yaitu 0,819 dan taraf signifikansi penelitian untuk variabel belanja modal sebesar $0,000 < 0,05$, sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia pada kabupaten/kota di Provinsi Bali tahun 2008-2013.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sri Kusreni dan Suhab (2009) menunjukkan bahwa alokasi belanja modal berhubungan positif dan berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, artinya setiap peningkatan alokasi belanja modal dalam APBD akan mendorong peningkatan angka IPM sebagai wujud peningkatan kesejahteraan sosial.

Untuk menguji variabel mediasi yang memediasi hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Pengaruh tidak langsung belanja modal (X_1) terhadap indeks pembangunan manusia (Y) melalui variabel mediasi/intervening pertumbuhan ekonomi(X_2). Hasil pengaruh tidak langsung dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 7.
Ringkasan Hasil Regresi Pengaruh Tidak Langsung Variabel

Hubungan Variabel	Variabel Mediasi	ab	Sab	Z	Keterangan
$X_1 \rightarrow Y$	X_2	1,242	0,285	4,35	X_2 merupakan variabel mediasi

Sumber : data diolah, 2015

Tabel 7 menunjukkan hasil ringkasan uji sobel yaitu pengaruh tidak langsung variabel belanja modal (X_1) terhadap indeks pembangunan manusia (Y) melalui mediasi pertumbuhan ekonomi (X_2). Oleh karena hasil perhitungan menunjukkan nilai z $4,35 > 1,96$, artinya H_0 di tolak dan H_1 diterima. Artinya bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan variabel mediasi, yang memediasi pengaruh variabel belanja modal terhadap indeks pembangunan manusia pada kabupaten/kota di Provinsi Bali periode 2008-2013.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) Terdapat pengaruh positif dan signifikan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Bali periode 2008-2013. Berdasarkan pada hal tersebut menunjukkan bahwa belanja modal berdampak terhadap Pertumbuhan ekonomi, jika belanja modal semakin meningkat, maka akan memacu terjadinya peningkatan pertumbuhan ekonomi, 2) Terdapat pengaruh positif dan signifikan pertumbuhan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia pada kabupaten/kota di Provinsi Bali periode 2008-2013. Hal tersebut berarti peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah akan berpengaruh meningkatkan indeks pembangunan manusia, 3) Terdapat pengaruh positif dan signifikan belanja modal terhadap indeks pembangunan manusia pada kabupaten/kota di Provinsi Bali periode 2008-2013. Berdasarkan pada hal tersebut menunjukkan bahwa peningkatan belanja modal akan berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia, 4) Belanja modal berpengaruh positif dan signifikan secara tidak langsung terhadap indeks pembangunan manusia melalui mediasi pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Bali Periode 2008-2013. Hal ini berarti pertumbuhan ekonomi merupakan variabel mediasi.

Berdasarkan simpulan yang diuraikan sebelumnya, berikut saran yang dapat diberikan, yaitu : 1) Pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Bali agar lebih meningkatkan pelayanan publik dalam bentuk belanja modal yang merupakan salah satu sarana penunjang dan juga sebagai stimulus dalam

meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Agar suatu daerah dapat menggali potensi-potensi yang ada di daerah itu sendiri sehingga dapat menggerakkan roda perekonomian, 2) Pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Bali diharapkan dapat mengurangi ketimpangan dan juga pemerataan pembangunan sehingga berdampak pada peningkatan pendapatan sehingga mencerminkan peningkatan pada kesejahteraan masyarakat. Pemerintah diharapkan lebih intensif meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat, seperti infrastruktur, sarana maupun prasarana. dengan meningkatkan alokasi anggaran belanja modal ke hal-hal yang produktif bukan ke hal-hal yang bersifat konsumtif saja, karena belanja modal yang dilakukan pemerintah secara langsung dapat memberikan dampak peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan secara tidak langsung juga memberikan dampak pada peningkatan pendapatan perkapita melalui program-program padat karya kepada masyarakat.

REFERENSI

- Anggraini, Rinda Ayun dan Lutfhi Muta Ali. 2012. Pola Hubungan Pertumbuhan ekonomi dan Pembangunan Manusia. Jawa Timur.
- Aschauer, D.A. 1989. *Is Public Investment Productive. Journal of Monetary Economics*, 23. 177-200.
- Arsyad, Lincolin. 2010. *Ekonomi Pembangunan. Edisi ke 5*. Yogyakarta : Unit penerbit dan Percetakan STIM.YKPM.
- Badan Pusat Statistik. 2014. *Bali Dalam Angka Tahun 2014*. Bali.
- Bali Post. 2013. IPM Karangasem Terendah di bali. Bali.

- Chinweoke, Nwaeze and Okeoma Paschal. 2014. *Impact Of Government Expenditure On Nigeria's Economic Growth 1992-2011. The MacrotHEME Review 3(7)*. SI 2014.
- Guritno Mangkoesoebroto. 1993. *Ekonomi Publik*. Edisi ketiga : Yogyakarta. BPFE.
- Halim, Abdul. 2001. *Bunga Rampai: Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMP YKPN.
- , 2002. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*, Jakarta: Salemba Empat
- , 2007. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Jimmy Steven Wanimbo. 2013. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah (Belanja Modal) dan Angkatan Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Papua 2008-2011. *Tesis*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Jhingan, M.L. 2004, *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Krisna Dewi, Putu Ayu. 2014. Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Bali. *E- Jurnal EP Unud*. 4 (1) : 32- 40.
- Lilis Setyowati. 2012. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, DAU, DAK, PAD terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Pengalokasian Anggaran Belanja Modal sebagai variabel intervening. *Jurnal Prestasi*. Vol. 9 No. 1 – Juni – 2012.
- Lugastoror, Decta Pitron. 2013. Analisis Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Jawa Timur. *Jurnal Ilmiah*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Malang.
- Midgley, J. (1995). *Social Development: The Developmental Perspective in Social Welfare*. London: Sage. *Midgley's definition has been widely cited and provides a broad encompassing approach that links social welfare directly to economic development.*
- Mirza, Sulistio Denni. 2012. Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Modal terhadap indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Indonesia.

- Muammil, Sunan. 2012. Analisis Hubungan Indeks Pembangunan Manusia dengan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Maluku Utara. *Media Trend*. Vol.7 No. 1 Maret 2012, hal 98-117. Universitas Khairun.
- Nikos Benoss. 2009. *Fiscal Policy and Economic Growth: Empirical Evidence from EU Countries*. *Journal*. University of Ioannina.
- Oluwatobi, Stephen O. 2011. *Government Expenditure on Human Capital Development Implications for Economic Growth in Nigeria*. *Journal of Sustainable Development*. Vol. 4 No.3 June 2013.
- Prakarsa, Dwi Febrian. 2014. Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan ekonomi. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Malang.
- Ramirez, A. G, Rannis, and F. Stewart. 1998. *Economic Growth and Human Capital*. *QEH Journal No.18*.
- Sheila Ardhian Nuarisa. 2012. Pengaruh PAD, DAU dan DAK Terhadap pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Jurnal Akuntansi*. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Indonesia.
- Stanton, Elizabeth A. 2007. *The Human Development Index: A History*. *Working Paper Series Number 127* : Global Development and Environment Institute Tufts University.
- Sri Kusreni dan Sultan Suhab. 2009. Kebijakan APBD dan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Sulawesi selatan. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan manajemen*. Vol. 5 No 3 – April – 2009.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: CV. Alfabeta.
- Suharto, Edi. Negara Kesejahteraan dan reinviting Depsos. *Wallfer State Depsos*. *Draf/Working paper*. 2006
- Sukirno, Sadono 2006. *Ekonomi Pembangunan*. Edisi Kedua. Jakarta: Prenada Media Group.
- Suyana Utama. 2009. *Aplikasi Analisis Kuantitatif*. Edisi Ke 3. Denpasar: Fakultas Ekonomi Universitas Udayana
- Whitaker, William H. Dan Ronald C. Fedrico. 1997. *Social walfare in Today's world*. *Journal*. New York: Mc Graw-Hill Companies.
- Yusuf, Noor Andi Fakhruddin. 2014. Analisis Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Eks

Kerasidenan Surakarta. Skripsi. Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro, Semarang.